

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang memuat tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan ketertiban dunia, serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Perkembangan jaman saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain yang telah maju. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh pada kemajuan diberbagai bidang. Di samping mengusahakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah perlu melakukan perataan pendidikan dasar badi setiap Warga Negara Indonesia, agar mampu berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat dibentuk manusia yang berkualitas, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seperti peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan pertanyaan di atas, pendidikan merupakan usaha dasar yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang dipikirkan secara matang, rasional dan logis, bukan usaha coba-coba dan sembarangan tanpa tujuan yang bermakna.

Oleh karena itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha membudayakan manusia atau memanusiakan manusia. Untuk mewujudkannya maka proses pendidikan harus memperhatikan program pembelajaran yang akan disampaikan. Salah satu program pembelajaran yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Adapun mata pelajaran PKn menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (Kurikulum 2006 mata pelajaran kewarganegaraan, 2003 : 2 ) sebagai berikut :

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.”

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu yang diajarkan di sekolah mempunyai peranan penting dalam rangka menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan” artinya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran inti atau pendidikan umum yang wajib diikuti oleh siswa disetiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dengan demikian maka program pendidikan diarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila yaitu nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan nilai moral agama. Penanaman nilai moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak lain adalah untuk membina kedisiplinan siswa dalam mengatasi kenakalannya di sekolah.

Berdasarkan pengamatan sementara di SMA Pasundan 7 Bandung, menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak disiplin/nakal di sekolah, contohnya adalah masih ada sebagian siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Pelanggaran yang dimaksud adalah bolos sekolah, merokok di lingkungan sekolah, berpakaian tidak rapi, setelah melakukan observasi dan

wawancara terhadap guru PKn sudah memperlihatkan kedisiplinannya, dalam berpakaian selalu rapi dan sesuai jadwal, datang kesekolah lebih awal, gaya bicara yang sopan, dalam kegiatan pembelajaran selalu memberikan tugas dan memeriksanya. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, siswa diberi teguran oleh guru. Apabila siswa tetap melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan tata tertib sekolah yang salah satunya adalah wajib mencerminkan sikap dan perilaku yang menjadi teladan bagi siswanya maka guru PKn selalu berusaha untuk menjadi teladan baik bagi siswanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menerapkan rasa disiplin untuk mengatasi kenakalan, diperlukan peran serta guru karena guru sebagai pengelola kelas (*learning manager*) guru hendaknya mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi, dan selain itu guru adalah sebagai teladan bagi siswa-siswanya dapat mencontohkan dari perilaku guru-gurunya dan dengan demikian siswa-siswi tersebut dapat mentaati tata tertib sekolah. Selain itu peran serta orang tua sangat penting untuk dapat menanamkan rasa disiplin dan kepatuhan sejak kecil.

Hasil dari meminimalisir kenakalan akan terasa baik oleh guru, siswa serta tenaga pendidik lainnya dalam proses keberhasilan pembelajaran disekolah. Hal ini tentunya akan berhasil jika kenakalan ini benar-benar dapat diatasi, apabila kenakalan tidak dapat diatasi secara benar maka akan menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib disekolah. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rusyady (1996 : 15.[http.www.Diaz Corner//pendidikan nilai moral.com](http://www.DiazCorner//pendidikan%20nilai%20moral.com))

“Pelanggaran kenakalan akan berpengaruh luas tidak hanya berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran, tetapi juga terhadap siswa baik sebagai warga sekolah, maupun masyarakat dan warga negara”.

Berdasarkan pernyataan di atas di harapkan melalui Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10.[http://Garda Pendidikan Karakter, Budaya, dan Moral.HTM](http://Garda.Pendidikan.Karakter,Budaya,dan.Moral.HTM)).

Pelanggaran tata tertib dalam hal ini kenakalan siswa di sekolah menunjukkan siswa kurang patuh terhadap peraturan sekolah. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan di sekolah kurang dihargai dan diperhatikan siswa. Sekolah memegang peran yang sangat penting terkait dengan karakteristik siswa seperti perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu yang oleh sikap, minat, keinsafan, pengetahuan dan faktor lain yang mempengaruhinya. Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah adalah sebuah kesiapan yang harus dtanamkan kepada siswa di sekolah agar mempunyai sikap dan perbuatan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang akan patuh atau sadar dalam mematuhi peraturan atau hukum berkaitan pula dengan faktor peraturan atau hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Peranan Guru pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengatasi Kenakalan**”.

## **B. Rumusan Pembatasan Masalah**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih lanjutnya rumusan masalah diatas dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung ?
3. Bagaimana hambatan yang dialami oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung ?
4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas, yang secara umum adalah untuk memperoleh gambar secara faktual dan aktual mengenai upaya guru PKn dalam mengatasi kenakalan siswa.

## **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan guru Pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung .
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung .
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dialami oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung .
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Pasundan 7 Bandung .

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam hal menjelaskan Upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi kenakalan siswa di sekolah. Kejelasan masalah ini sangat berguna dalam kajian-kajian kenakalan dan kesadaran tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan.

## 2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian diharapkan memberi manfaat dalam hal berikut:

1. Sebagai pedoman bagi sekolah dalam membina kenakalan siswa.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah terutama pejabat pemerintah di bidang pendidikan, tentang pentingnya seorang guru PKn mengatasi kenakalan siswa disekolah.
3. Bagi pihak guru diharapkan :
  - a. Lebih meningkatkan pentingnya membina kenakalan siswa di sekolah demi terciptanya suasana sekolah yang tertib , aman dan damai sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.
  - b. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kenakalan siswa.

## D. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tujuan nasional yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah senantiasa berusaha untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Dengan pelaksanaannya secara bertahap, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan secara terpadu yaitu bukan hanya cerdas dan sehat fisik tapi juga sumber daya manusia yang berkreasi yang paripurna sebagai pelaksana pembangunan secara estafet dan terus menerus kearah yang lebih baik.

Oleh karena itu, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melakukan berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Selain itu sesuai dengan visi dan misi tujuan nasional diharapkan dapat mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta memiliki iman dan taqwa, secara selaras, serasi dan seimbang dan memiliki etos kerja dan berdisiplin tinggi.

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pendidikan, maka mata pelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena dalam mata pelajaran PKn diberikan penanaman sikap moral dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

Melalui kerangka dasar tersebut, supaya pembelajaran PKn tepat sasaran diupayakan penyajian pembelajaran PKn di sajikan dengan menggunakan multi metode dan media, dan keteladanan.

#### **E. Definisi Operasional**

Adapun beberapa penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah :

1. Guru: Menurut Djahiri (1992 : 11) guru adalah yang tugasnya mengajar, berdiri dan menyampaikan pelajaran di muka kelas dengan tugas akhir menentukan penilaian atau yang mengabdikan pada dunia pendidikan.
2. Sekolah: Salah satu lembaga pendidikan, tempat belajar dimana anak akan berusaha membina, mengembangkan dan menyempurnakan potensi dirinya serta dunia kehidupan masa depan. Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda dengan menjadi manusia dewasa dan berbudaya.(Djahiri).
3. Kenakalan: Siswa yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya, Menurut Kuhn (1970).

4. Siswa: Siswa adalah peserta didik yang mengalami proses belajar (Sudjana, 1996:5)

## **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur organisasi skripsi berikut dengan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi tersebut disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. Bab II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang kajian teori, analisis dan pengembangan materi pelajaran yang diteliti (meliputi keluasaan dan kedalaman materi, karakteristik materi, bahan dan media, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi).

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian, desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, serta analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dicapai serta pembahasan penelitian.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan kesimpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian.